

Bahasa sebagai Alat Kekuasaan: Telaah Kontekstual dalam Analisis Wacana Kritis"

Sukrin

Universitas Pendidikan Ganesha

*Corresponding Author e-mail: Babarao83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peran strategis bahasa sebagai alat kekuasaan dalam berbagai konteks sosial dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mereproduksi dominasi, membingkai realitas, dan menyisipkan ideologi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis berbagai teks seperti pidato politik, berita media daring, dokumen kebijakan, dan wacana media sosial. Model analisis yang digunakan merujuk pada pendekatan Fairclough dan Van Dijk yang memadukan analisis teks, konteks, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa digunakan secara sistematis untuk meneguhkan kekuasaan melalui strategi seperti eufemisme, kalimat pasif, diksi politis, serta konstruksi narasi yang menyudutkan kelompok tertentu. Selain wacana dominan, ditemukan pula bentuk resistensi melalui wacana tandingan yang muncul di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa praktik bahasa merupakan arena kontestasi makna yang terus berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa adalah medan kuasa yang kompleks, dan pemahaman terhadap relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih kritis, adil secara simbolik, dan setara dalam produksi makna.

Kata Kunci: *bahasa, kekuasaan, analisis wacana kritis, ideologi, dominasi*

PENDAHULUAN

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi netral yang digunakan untuk menyampaikan pesan, melainkan juga medium utama dalam membentuk realitas sosial, mempertahankan struktur kekuasaan, dan mereproduksi ideologi (Foli et al., 2023). Dalam praktik sehari-hari, penggunaan bahasa sering kali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tersembunyi yang melibatkan relasi kuasa antara individu maupun kelompok dalam masyarakat (Truong, 2024). Oleh karena itu, bahasa menjadi salah satu alat paling strategis dalam membingkai makna, membentuk persepsi, dan bahkan memanipulasi kesadaran publik (Melnichuk & Starodubtseva, 2023).

Analisis Wacana Kritis (AWK) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk membongkar dimensi ideologis dan politis yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam berbagai konteks sosial (Namjoo, 2019). Berbeda dari pendekatan analisis wacana konvensional yang cenderung deskriptif dan struktural, AWK menekankan pentingnya pemahaman terhadap teks, konteks, dan kekuasaan secara dialektis. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis struktur linguistik suatu wacana, tetapi juga mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk mendominasi, mengontrol, atau bahkan menindas kelompok tertentu secara simbolik (HUSSEIN et al., 2024).

Dalam kerangka teori yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Norman Fairclough, Teun A. van Dijk, dan Ruth Wodak, analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai praktik sosial yang sarat akan makna dan kekuasaan. Bahasa tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai instrumen ideologis yang dapat digunakan untuk membentuk hegemoni, mempertahankan status quo, serta membatasi ruang ekspresi kelompok-kelompok marginal (Speed, 2023). Proses produksi dan konsumsi wacana tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya (Hart, 2022).

Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, media, pendidikan, hingga hukum. Misalnya, dalam media massa, pemilihan diksi dan cara penyajian berita dapat mengarahkan opini publik dan menyembunyikan kepentingan tertentu. Dalam dunia pendidikan, buku teks dan narasi sejarah sering kali mencerminkan pandangan ideologis penguasa atau elit dominan (Riyanti, 2023). Sementara itu, dalam praktik hukum, konstruksi bahasa hukum yang sulit diakses masyarakat awam mencerminkan jarak antara wacana negara dan kebutuhan rakyat (Mehmood, 2023). Semua contoh ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran kunci dalam mengatur, menyusun, dan menormalkan tatanan sosial tertentu.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan bahasa sebagai alat kekuasaan juga tampak nyata dalam dinamika sosial-politik dan kebijakan publik. Pilihan bahasa dalam pidato kenegaraan, narasi pembangunan, hingga kampanye pemilu, sering kali disusun secara strategis untuk menciptakan citra tertentu, membangun legitimasi, atau menyingkirkan pihak oposisi secara halus. Bahkan dalam ranah hukum, istilah-istilah teknis yang digunakan sering kali menciptakan jarak pemahaman antara institusi hukum dan masyarakat awam. Situasi ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan isi, tetapi juga membentuk cara pandang dan membatasi makna sekaligus menjadi alat selektif dalam menentukan siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus diam.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan media sosial memperlihatkan bentuk baru dari kuasa bahasa dalam ruang virtual. Wacana dominan dapat tersebar luas melalui algoritma dan dikemas dalam bentuk visual, narasi pendek, atau tagar

yang viral. Bahasa yang digunakan dalam ruang digital sering kali mengandung muatan ideologis dan bias kekuasaan, bahkan turut membentuk identitas kolektif dan opini publik dalam skala masif (Hidayah, S.S, M.A & Anindhita, 2022). Fenomena ini memperkuat urgensi penggunaan pendekatan analisis wacana kritis yang tidak hanya sensitif terhadap teks, tetapi juga mampu membaca konteks digital, ekonomi politik media, serta jejaring kuasa yang bekerja di baliknya (Wodak, 2024).

Dengan demikian, penting untuk melakukan telaah kontekstual terhadap wacana-wacana yang beredar dalam masyarakat, baik yang muncul dalam media massa, pendidikan, politik, maupun kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, kajian ini bertujuan mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membingkai realitas, menyebarkan ideologi tertentu, dan memelihara struktur sosial yang tidak seimbang. Upaya ini sekaligus menjadi kontribusi intelektual dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap bahaya laten kekuasaan yang diselubungi oleh bahasa, serta membuka ruang bagi praktik wacana yang lebih adil dan setara dalam masyarakat demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis (AWK) sebagai landasan utama dalam menggali makna bahasa sebagai alat kekuasaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji teks secara mendalam dalam hubungannya dengan konteks sosial, politik, dan ideologis yang melingkupinya. Analisis dilakukan tidak hanya pada bentuk dan struktur bahasa, tetapi juga pada makna-makna tersembunyi yang merepresentasikan relasi kuasa dan produksi ideologi dalam wacana tertentu.

Jenis penelitian ini bersifat analisis teks berbasis konteks, di mana data utama berupa teks tertulis yang dipilih secara purposif, seperti berita media massa daring, pidato politik, dokumen kebijakan publik, atau konten media sosial yang mengandung indikasi praktik dominasi dan kekuasaan melalui bahasa. Teks-teks tersebut dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk dan Norman Fairclough, yang menekankan keterkaitan antara struktur wacana, konteks sosial, serta akses terhadap kekuasaan.

Prosedur analisis melibatkan tiga tahap utama: (1) Analisis teks, yaitu mengidentifikasi pilihan kata, struktur kalimat, metafora, dan strategi retorik dalam wacana; (2) Analisis konteks, mencakup pemetaan hubungan sosial, latar belakang ideologis, serta kondisi politik dan ekonomi yang melatarbelakangi teks; dan (3) Analisis produksi dan konsumsi wacana, yaitu menelaah siapa yang memproduksi teks, siapa yang menjadi target pembacanya, serta bagaimana wacana tersebut didarkan dan diterima oleh masyarakat.

Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi teori, yakni dengan membandingkan hasil temuan dari dua perspektif utama dalam AWK (Van Dijk dan

Fairclough), serta triangulasi sumber, yaitu menganalisis lebih dari satu jenis teks dan konteks sosial untuk memastikan konsistensi makna dan pola dominasi. Dokumentasi dan pencatatan proses analisis dilakukan secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap sejumlah teks yang dikaji yakni berita politik di media daring, pidato tokoh publik, serta narasi institusi pemerintah menunjukkan bahwa bahasa digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen dominasi yang efektif. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan retorika yang terencana, wacana-wacana tersebut membingkai realitas sosial tertentu sesuai kepentingan pihak dominan.

Dalam pidato kenegaraan, misalnya, ditemukan penggunaan diksi-diksi seperti “kemajuan”, “stabilitas”, “ancaman”, dan “ketertiban” yang membangun narasi hegemonik bahwa negara adalah pelindung dan pemegang otoritas tunggal dalam mendefinisikan keamanan dan pembangunan. Kata-kata tersebut tidak bersifat netral, melainkan merepresentasikan posisi kuasa, di mana negara ditempatkan sebagai subjek aktif dan masyarakat sebagai objek pasif yang harus mengikuti. Dalam konteks ini, bahasa berperan membangun legitimasi kekuasaan dan membatasi ruang kritik.

Sementara itu, dalam analisis teks media, ditemukan bahwa struktur berita tertentu secara halus memperkuat stereotip sosial. Berita-berita yang menyoroti kelompok minoritas atau oposisi politik kerap menggunakan metafora negatif atau kalimat pasif yang mengaburkan pelaku sebenarnya. Misalnya, penggunaan frasa seperti “kerusakan terjadi” tanpa menyebut siapa yang memicu, atau “disebut-sebut sebagai provokator” yang menempatkan pihak tertentu dalam posisi bersalah meskipun belum terbukti. Strategi ini menunjukkan bagaimana media dapat mereproduksi kekuasaan melalui representasi bahasa yang bias.

Pendekatan model Van Dijk dalam analisis ini menyoroti bagaimana teks diproduksi oleh kelompok dominan yang memiliki akses terhadap sarana produksi wacana, seperti media, institusi negara, dan ruang publik digital. Sementara itu, model Fairclough membantu menjelaskan bagaimana wacana tersebut tidak hanya diproduksi, tetapi juga dikonsumsi dan dimaknai oleh masyarakat melalui struktur sosial yang telah terbentuk (Oktiaputri, 2023). Artinya, masyarakat bukan hanya penerima pasif, tetapi juga bagian dari siklus reproduksi makna, walau sering kali tanpa disadari.

Kekuatan bahasa sebagai alat kekuasaan juga tampak dalam bentuk pengaburan ideologi. Narasi pembangunan yang dikemas secara positif dapat menutupi praktik ketimpangan, eksklusi sosial, dan eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya merefleksikan realitas, tetapi menciptakan realitas versi kekuasaan (Fayruza et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk

memiliki kesadaran kritis terhadap wacana-wacana yang dikonsumsi, agar tidak terjebak dalam konstruksi yang manipulatif.

Selain pada ranah politik dan media, penggunaan bahasa sebagai alat kekuasaan juga tampak signifikan dalam praktik pendidikan. Kajian terhadap buku teks dan kurikulum menunjukkan bahwa pemilihan istilah, tokoh yang ditonjolkan, serta cara peristiwa sejarah dituturkan mencerminkan perspektif dominan negara. Misalnya, penggunaan kata “pemberontak” untuk kelompok yang menentang kekuasaan negara, sementara kelompok penguasa disebut sebagai “pahlawan” atau “penyelamat bangsa”. Wacana semacam ini tidak hanya membingkai makna secara ideologis, tetapi juga mendisiplinkan cara berpikir siswa sejak dini untuk tunduk pada narasi tunggal yang dibentuk oleh institusi negara.

Temuan lain juga menunjukkan bahwa dalam ruang digital, khususnya media sosial, bahasa digunakan secara strategis untuk menciptakan polarisasi opini. Hashtag tertentu yang viral, seperti #KamiBersamaX atau #TolakY, sering kali menjadi alat mobilisasi politik dan pemingkanaan ideologi secara masif. Bahasa yang digunakan dalam kampanye digital tersebut dirancang untuk membentuk citra baik terhadap satu pihak dan menciptakan antagonisme terhadap pihak lain. Di sinilah kuasa bekerja secara halus melalui wacana yang berulang dan direproduksi oleh pengguna media yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi bagian dari agenda ideologis yang lebih besar.

Pendekatan intertekstualitas dalam AWK juga menunjukkan bahwa teks-teks tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terhubung dengan teks lain yang membentuk jaringan makna sosial. Misalnya, wacana “radikalisme” dalam berita media nasional sering dikaitkan dengan kelompok atau simbol agama tertentu, padahal makna istilah tersebut sangat tergantung pada konteks dan kepentingan pihak yang menggunakannya (Elias et al., 2021). Dalam analisis ini, bahasa bekerja bukan hanya melalui isi literalnya, tetapi melalui asosiasi dan presupposisi yang dibawa oleh pembaca dari teks lain yang mereka konsumsi.

Dari sisi strategi linguistik, ditemukan bahwa penggunaan kalimat pasif dan eufemisme menjadi cara efektif untuk menyamarkan pelaku dan mengalihkan tanggung jawab. Dalam kasus kekerasan struktural, misalnya, sering digunakan frase seperti “telah terjadi bentrok antara warga dan aparat”, yang seolah-olah menunjukkan peristiwa netral dan spontan, padahal dalam kenyataan terdapat ketimpangan kuasa yang tidak terlihat dalam konstruksi kalimat tersebut. Strategi semacam ini memperkuat posisi kekuasaan tertentu dan melemahkan posisi pihak lain yang seharusnya menjadi pusat perhatian atau pembelaan.

Secara keseluruhan, pembacaan kritis terhadap teks-teks yang dianalisis menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya memuat pesan, tetapi juga menyisipkan nilai, ideologi, dan relasi kuasa. Bahasa adalah bentuk praktik sosial yang menyimpan agenda, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks inilah, Analisis Wacana

Kritis menjadi penting sebagai instrumen untuk membongkar proses dominasi yang terselubung dalam teks dan memahami dinamika sosial yang berlangsung melalui praktik berbahasa.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa wacana yang beredar di ruang publik baik media massa, institusi pendidikan, maupun kanal digital dikonstruksi secara sistematis untuk mereproduksi kekuasaan. Bahasa dipilih, disusun, dan disampaikan bukan sekadar alat menyampaikan pesan, melainkan sebagai sarana penguatan ideologi dan legitimasi sosial-politik. Dalam praktiknya, bahasa menjadi arena perebutan makna di mana dominasi kelompok elit terjaga secara halus melalui struktur bahasa yang "terkesan netral".

Misalnya, dalam pidato politik pejabat negara, ditemukan strategi retorik yang memusatkan kekuasaan pada aktor negara melalui kalimat-kalimat afirmatif yang melegitimasi peran mereka sebagai pelindung rakyat, sekaligus menyalahkan pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas. Dalam konteks ini, kuasa disisipkan dalam narasi kebijakan dan dibungkus dalam bahasa moral seperti "demi kebaikan bersama" atau "untuk menjaga keutuhan bangsa".

Sementara itu, dalam teks berita media daring, konstruksi realitas sosial dilakukan dengan cara menyaring informasi dan membingkai makna tertentu. Analisis menunjukkan bahwa teks berita tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyusun "realitas wacana" yang dipengaruhi oleh agenda redaksi. Misalnya, istilah seperti "oknum", "massa tak dikenal", atau "kelompok radikal" kerap digunakan untuk menyamakan aktor dominan dan menggiring opini pembaca terhadap arah tertentu.

Temuan-temuan ini direkap dalam tabel berikut.

No	Sumber Wacana	Strategi Bahasa yang Digunakan	Bentuk Kekuasaan yang Ditampilkan	Penjelasan Kontekstual
1	Pidato politik	Diksi afirmatif, kalimat aktif, eufemisme	Legitimasi kekuasaan negara	Penguasa tampil sebagai pelindung rakyat
2	Media daring	Kalimat pasif, generalisasi, labelisasi negatif	Diskreditasi kelompok minoritas	Opini publik diarahkan untuk menguatkan narasi elit
3	Buku teks sejarah	Penggunaan istilah ideologis, penghapusan peran alternatif	Normalisasi ideologi dominan	Kurikulum menyembunyikan perspektif tandingan
4	Media sosial politik	Hashtag politis, diksi emosional, bahasa polarisasi	Mobilisasi opini publik, propaganda digital	Bahasa dipakai untuk menyerang dan membela

No	Sumber Wacana	Strategi Bahasa yang Digunakan	Bentuk Kekuasaan yang Ditampilkan	Penjelasan Kontekstual
5	Undang-undang kebijakan	Bahasa teknokratik, kalimat multitafsir, legalistik	Pembatasan akses publik terhadap wacana hukum	Hukum tampil eksklusif dan melanggengkan status quo

Temuan ini memperlihatkan bahwa bahasa tidak bekerja secara netral dalam masyarakat, melainkan merupakan alat reproduksi struktur sosial yang meneguhkan posisi kelompok dominan. Sejalan dengan pandangan Van Dijk (1993), praktik wacana selalu terkait erat dengan akses terhadap pengetahuan dan media produksi. Mereka yang memiliki kuasa atas teks dan saluran penyebarannya akan memiliki kontrol terhadap konstruksi makna dalam masyarakat.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat terutama dalam dunia pendidikan dan media untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap bagaimana bahasa bekerja. Penggunaan pendekatan AWK dapat membantu membuka lapisan-lapisan tersembunyi dalam teks dan membantu mengungkap relasi kuasa yang tidak kasat mata namun memengaruhi cara berpikir kolektif. Dalam konteks demokrasi yang sehat, praktik bahasa yang terbuka, adil, dan reflektif menjadi syarat penting agar relasi kekuasaan tidak menjadi alat penindasan yang terselubung.

Analisis terhadap berbagai wacana yang dikaji juga menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam bahasa tidak selalu bersifat linear dan satu arah. Dalam beberapa konteks, terutama di ruang media sosial dan forum diskusi digital, muncul pula bentuk resistensi wacana (counter discourse) yang menantang narasi dominan (L & Lavanya, 2021). Misalnya, ketika suatu kebijakan publik dibingkai media arus utama dengan diksi positif seperti “reformasi” atau “penertiban”, muncul respons tandingan dari masyarakat sipil melalui tagar, meme, atau opini yang menolak narasi tersebut dengan bahasa yang lebih sarkastik atau ideologis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang wacana bukan hanya menjadi arena produksi kekuasaan, tetapi juga ruang kontestasi makna. Masyarakat tidak selalu menerima wacana dominan secara pasif. Sebaliknya, mereka memiliki kapasitas untuk mengkritik, menafsirkan ulang, atau bahkan membongkar ideologi tersembunyi di balik bahasa kekuasaan. Ini membuktikan bahwa praktik bahasa dalam masyarakat bersifat dialektis selalu dalam proses tawar-menawar makna, antara dominasi dan perlawanan.

Dimensi intertekstualitas dan interdiskursivitas juga menjadi temuan penting dalam analisis ini. Teks tidak pernah berdiri sendiri; ia membawa jejak teks lain yang pernah dibaca, ditulis, atau dituturkan. Sebagai contoh, narasi “radikalisme” yang muncul dalam berita nasional ternyata berkaitan erat dengan wacana global pasca-

9/11, di mana segala bentuk keberagaman yang vokal dipandang sebagai ancaman. Wacana lokal pun terpengaruh oleh narasi global, dan hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan bekerja bukan hanya secara struktural, tetapi juga melalui sirkulasi ide global yang terserap ke dalam konteks lokal.

Demikian pula dalam wacana pendidikan, ditemukan bahwa istilah “merdeka belajar” yang dikampanyekan oleh pemerintah mengandung kontradiksi ketika diterapkan secara teknis dalam kurikulum yang tetap sentralistik. Secara diskursif, frasa tersebut mengandung makna emansipatoris; namun, praktiknya menunjukkan adanya kuasa negara yang tetap mengatur isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Ini menjadi contoh konkret bahwa retorika wacana bisa menciptakan ilusi kebebasan, padahal di baliknya terdapat struktur kuasa yang tetap dominan.

Tinjauan terhadap struktur teks juga memperkuat temuan bahwa bahasa dirancang untuk mengontrol persepsi. Dalam teks berita, misalnya, urutan informasi atau struktur piramida terbalik (*inverted pyramid*) sering digunakan untuk menempatkan narasi utama di bagian awal, sedangkan informasi yang bisa meragukan narasi utama diletakkan di akhir atau dihilangkan sama sekali. Hal ini sesuai dengan teori Van Dijk tentang topik dan skema wacana, di mana elemen-elemen wacana diatur untuk memengaruhi cara pembaca memahami isu secara keseluruhan.

Lebih lanjut, kekuasaan dalam wacana juga diproduksi melalui akses terhadap media produksi dan reproduksi wacana. Pihak-pihak yang memiliki akses terhadap media massa, platform digital, atau lembaga formal memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan apa yang disebut sebagai “kebenaran sosial” (Elias et al., 2021). Sementara kelompok marginal sering kali hanya memiliki akses terhadap bentuk-bentuk komunikasi terbatas dan informal. Ketimpangan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pertarungan makna sosial, di mana suara kelompok lemah cenderung terpinggirkan atau dibungkam.

Berdasarkan seluruh temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah medan kuasa yang kompleks. Ia tidak hanya menjadi alat menyampaikan pikiran, tetapi juga sarana menciptakan, mempertahankan, atau menggugat kekuasaan. Analisis Wacana Kritis memberikan instrumen konseptual dan metodologis untuk membuka “lapisan ideologis” yang menyelubungi teks, serta menempatkan bahasa dalam konteks sosial, historis, dan politiknya. Melalui pendekatan ini, praktik kebahasaan dapat dilihat sebagai bagian integral dari praktik sosial yang tidak bisa dilepaskan dari struktur dominasi dan perjuangan makna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki fungsi yang jauh melampaui peran komunikatifnya. Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK), bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang melekat erat dengan struktur kekuasaan, ideologi, dan

kepentingan politik yang melingkupi produksi serta konsumsi wacana dalam masyarakat. Bahasa tidak pernah netral; ia selalu digunakan dalam konteks sosial tertentu dan sarat akan makna yang dibentuk serta dibingkai oleh relasi kuasa yang tidak setara.

Temuan utama menunjukkan bahwa strategi kebahasaan seperti diksi afirmatif, kalimat pasif, metafora ideologis, labelisasi, hingga eufemisme, secara sistematis digunakan dalam berbagai jenis wacana baik pidato politik, teks media, kurikulum pendidikan, maupun narasi digital untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu, meredam perlawanan, dan membatasi akses terhadap makna. Bahasa, dalam hal ini, menjadi alat reproduksi ideologi dan pengendali persepsi publik.

Lebih lanjut, analisis juga menunjukkan adanya praktik resistensi wacana yang tumbuh di ruang publik, terutama melalui media sosial. Ini membuktikan bahwa relasi kuasa dalam bahasa bersifat dialektis dan dinamis, selalu terbuka terhadap kontestasi makna. Intertekstualitas dan interdiskursivitas dalam teks-teks yang dianalisis mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja tidak hanya secara lokal, tetapi juga dalam sirkulasi makna global yang terinternalisasi ke dalam konteks budaya dan sosial Indonesia.

Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya kesadaran kritis terhadap penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan AWK, bahasa tidak lagi dipandang sekadar simbol linguistik, melainkan sebagai arena ideologis yang menjadi ladang perjuangan makna. Kesadaran ini menjadi penting tidak hanya bagi akademisi atau peneliti bahasa, tetapi juga bagi masyarakat umum agar mampu membedakan antara wacana yang membebaskan dan wacana yang menindas secara simbolik. Dalam konteks demokrasi yang sehat, pemahaman kritis terhadap wacana publik merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang setara secara informasi dan adil secara simbolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Elias, A., Mansouri, F., & Paradies, Y. (2021). Media, Public Discourse and Racism. In *Racism in Australia Today* (pp. 211–240). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2137-6_6
- Fayruza, A. Z., Mahliatussikah, H., & Al Hayani, M. K. K. (2021). Critical Discourse Analysis of Teun A. Van Dijk's Model against Online News "The Decline in Refinery Profits Threatens to Increase Oil Prices." *Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature*, 4(3), 275–290. <https://doi.org/10.22219/jiz.v4i3.18274>
- Foli, K. J., Choflet, A., Matthias-Anderson, D., Mercer, M., Thompson, R. A., & Squires, A. (2023). The power of the language we use: Stigmatization of individuals and fellow nurses with substance use issues. *Research in Nursing & Health*, 46(1), 3–8. <https://doi.org/10.1002/nur.22295>

- Hart, C. (2022). *Critical Discourse Analysis*. In *Introducing Linguistics* (pp. 311–325). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003045571-19>
- Hidayah, S.S, M.A, A., & Anindhita, W. K. (2022). *Critical Discourse Analysis: Theoretical Framework*. *Jurnal Pendidikan*, 31(1), 09–16. <https://doi.org/10.32585/jp.v31i1.1970>
- HUSSEIN, A. K., HAZEM, A. H., & AL-GAILANY, M. M. (2024). *From Crisis to Hope: Asian Journal of Human Services*, 26, 122–134. <https://doi.org/10.14391/ajhs.26.122>
- L, J., & Lavanya, D. K. (2021). *DISCOURSE, COGNITION AND SOCIETY: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE STORY THAT MUST NOT BE TOLD*. *ENSEMBLE*, 2(2), 28–36. <https://doi.org/10.37948/ensemble-2020-0202-a004>
- Mehmood, S. T. (2023). *Critical Discourse Analysis of Emma Watson’s Speech at ‘He for She’ Campaign*. *Sindh Journal of Linguistics*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.58921/sjl.v2i1.19>
- Melnichuk, M. V., & Starodubtseva, E. A. (2023). *Language as a tool for society manipulating (the experience of foreign countries)*. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*, 12(6), 63–71. <https://doi.org/10.26794/2226-7867-2022-12-6-63-71>
- Namjoo, M. (2019). *LANGUAGE AS A SIGN OF POWER IN THE HANDMAID’S TALE*. *Epiphany*, 12(1), 85. <https://doi.org/10.21533/epiphany.v12i1.259>
- Oktiaputri, A. (2023). *ANALISIS WACANA KRITIS MODEL VAN DIJK TERHADAP BERITA ONLINE “GADUH PEDULILINDUNGI DITUDING MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA, ADA APA?”*; *Semantik*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i1.p1-20>
- Riyanti, E. D. (2023). *THE PHILOSOPHICAL BASIS OF CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS*. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 9(2). <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v9i2.293>
- Speed, E. (2023). *Discourse analysis*. In *Encyclopedia of Health Research in the Social Sciences* (pp. 98–102). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800885691.ch18>
- Truong, V. A. (2024). *Applying CDA/SFG in editorials to show power relations and ideology in language use*. *Tạp San Khoa Học và Kỹ Thuật Trường Đại Học Bình Dương*, 6(3). <https://doi.org/10.56097/binhduonguniversityjournalofscienceandtechnology.v6i3.180>
- Wodak, R. (2024). *Critical Discourse Analysis/Studies*. In *The Routledge Companion to English Studies* (pp. 31–44). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003221265-4>